

PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

Baso Akib¹, Iswandy²

¹Institut Parahikma Indonesia (IPI) Gowa, Jl. Mustafa Dg. Bunga No. 191, Prodi
Ekonomi Syariah,

²STIE YPUP Makassar, Jl. Andi Tonro No. 88a

E-Mail: basoakib335@gmail.com, Iswandy01@gmail.com

ABSTRAK

Baso Akib dan Iswandy. Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Pada Kantor Pemerintah Kabupaten Gowa. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prosedur akuntansi keuangan daerah pada Kantor Pemerintah Kabupaten Gowa. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian yang digunakan ialah selama 3 bulan yakni dimulai pada bulan mei sampai dengan bulan juli 2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif.

Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden dan data sekunder berupa laporan tahunan Pemerintah Kabupaten Gowa, serta data lainnya yang bersumber dari literatur-literatur yang mendukung permasalahan yang dibahas. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data terlebih dahulu yang ada kemudian diklasifikasikan, di analisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah kabupaten Gowa telah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah dengan peralatan yang kurang memadai, yaitu sistem komputerisasi yang belum dikuasai dan jumlah komputer yang masih kurang sehingga penyusunan laporan keuangan mengalami keterlambatan, Penyebab terjadinya keterlambatan penyusunan laporan keuangan salah satunya adalah sumber daya manusia dan Pelaporan pertanggungjawaban pada akhir tahun yaitu laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan arus kas dan neraca telah sesuai.

Kata Kunci: *Prosedur dan Akuntansi Keuangan Daerah.*

ABSTRACT

Baso Akib and Iswandy. Regional Financial Accounting Procedures at Gowa Regency Government Office. The research objective in this study was to determine and analyze the application of regional financial accounting procedures at the Gowa Regency Government Office. The research location was carried out at the Regional Secretariat of the Gowa Regency Government of South Sulawesi Province. The research time used was 3 months, starting from May to July 2018. The types of data used in this study were qualitative and quantitative data.

The data sources were obtained from primary and secondary data. Data obtained directly from the object of research. In this study, primary data was in the form of questionnaire results that have been filled in by respondents and secondary data is in the form of annual reports of the Gowa Regency Government, as well as other data that comes from literature that supports the issues discussed. The data collection method used in this research was by means of observation, interview and documentation with the method of data analysis carried out using descriptive analysis method, namely the method used by collecting existing data first then classified, analyzed, then interpreted so that it can provide a solution. to the problem.

The results of this study indicate that in the preparation of financial reports, the government of Gowa district has used a regional financial accounting system with inadequate equipment, namely a computerized system that has not been mastered and the number of computers is still insufficient so that the preparation of financial reports is delayed. one of which is human resources and accountability reporting at the end of the year, namely APBD calculation reports, APBD calculation notes, cash flow reports and balance sheets in accordance.

Keywords: *Regional Financial Accounting and Procedures.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat dengan program desentralisasi. Kebijakan tersebut menuntut adanya pengendalian yang lebih kuat dalam makna perumusan perangkat peraturan yang dapat mengendalikan dan mengarahkan arah pembangunan masyarakat secara umum. Proses penyusunan anggaran, saat ini juga tidak lagi diatur oleh pemerintah pusat, melainkan menggantungkan pada keharmonisan hubungan eksekutif (pemerintah daerah) dengan legislatif (DPRD). Penyusunan anggaran juga melibatkan peran serta masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan yang berkaitan dengan keuangan daerah, selama ini para pelaksana di daerah menggunakan Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) sebagai panduan dan pedoman kerja untuk pengurusan keuangan daerah dan berdasarkan Keputusan

Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980, MAKUDA merupakan petunjuk Pelaksanaan lanjut atas Pelaksanaan. Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan bergulirnya otonomi daerah oleh pemerintah pusat dengan program desentralisasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Bab V, bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membentuk satuan-satuan kerja, seperti dinas-dinas atau lembaga daerah lainnya sesuai kebutuhan. Bentuk pengaturan tersebut berupa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Ketentuan tersebut pada intinya mengharuskan agar pemerintah daerah segera menerapkan sistem akuntansi dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah sudah mutlak diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten maupun kota berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk memenuhi laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD. Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah. Unsur laporan tersebut berbeda dari laporan pertanggungjawaban yang lama, terutama mengenai Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah.

Anggota BPK, Bambang Wahyudi (2002) mengharapkan dengan sistem baru ini masalah pengelolaan dan pertanggungjawaban bisa lebih tertib, karena sudah baku. Tambahan unsur laporan pertanggungjawaban tersebut mutlak diperlukan seiring dengan harapan masyarakat adanya pertanggungjawaban yang lebih baik untuk menuju *good governance* dan *clean governance*. Sayangnya, semua pemerintah daerah belum menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang baru tersebut.

Namun demikian, banyak Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota yang menerapkan sistem ini secara setengah-setengah (konversi) yang mengakibatkan banyaknya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang seharusnya. Berbagai kendala dihadapi oleh pemerintah daerah tersebut, antara lain masalah sumber daya manusia, dana yang terbatas, tidak memahami pola perancangan, ketidakjelasan arahan pemerintah pusat (adanya himbauan untuk menunda kerjasama dengan konsultan), belum adanya standar akuntansi keuangan daerah dan lain-lain. Beberapa pemerintah daerah masih menunggu petunjuk dan arahan

yang lebih jelas tentang penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, akan tetapi hal tersebut tidak perlu terjadi seandainya pemerintah daerah memahami bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan wewenang. Pemerintah daerah memiliki tuntutan kepada masyarakat akan adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah tersebut di atas dapat diterapkan tanpa menunggu standar karena sistem tersebut dapat disesuaikan. Akan tetapi, pada standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah belum menyiapkan sistemnya maka penerapan akuntansi keuangan tidak akan terwujud dengan maksimal.

Dari latar belakang permasalahan dalam menyiapkan sistem penerapan akuntansi keuangan atas keuangan daerah oleh pemerintah daerah tersebut maka disusunlah prosedur akuntansi keuangan daerah agar pemerintah daerah dapat dengan mudah menerapkannya dan diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian: “Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah pada Kantor Pemerintah Kabupaten Gowa”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah penerapan prosedur akuntansi keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik pada Kantor Pemerintah Kabupaten Gowa?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prosedur akuntansi keuangan daerah pada Kantor Pemerintah Kabupaten Gowa.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empiris dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah dan kualitas laporan keuangan.

2. Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk dijadikan masukan dan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan di beberapa sumber disebut dengan akuntansi sektor publik. Secara organisasi akuntansi, domain publik antara lain meliputi pemerintah, BUMN/BUMD, universitas, yayasan dan organisasi nirlaba lainnya. Akuntansi Keuangan Daerah menurut Halim (2012) didefinisikan sebagai berikut: “Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi keuangan daerah ialah suatu metode yang digunakan untuk mencatat hasil dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam 1 waktu periode di suatu instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sedangkan menurut *Government Accounting Standard Board* 1987 seperti yang dikutip Freeman (2008), pengertian akuntansi pemerintahan adalah: *“Government accounting is an integral of the accounting discipline. It is founded on the basic concept underlying the accounting discipline as a whole and shares many characteristics with commercial accounting”*.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi pemerintah adalah suatu kesatuan dari ilmu akuntansi yang bersandar pada konsep dasar ilmu akuntansi secara menyeluruh dan memiliki beberapa kesamaan dengan akuntansi komersial. Dari definisi di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan informasi berupa pelaporan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak internal dan eksternal pemerintah yang memerlukan.

Karakteristik Organisasi Pemerintahan

Menurut Mardiasmo (2012), karakteristik dari organisasi pemerintah atau sektor publik dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

a. Tujuan Organisasi

Organisasi sektor publik atau organisasi pemerintah memiliki tujuan bukan untuk memaksimalkan laba melainkan pemberian pelayanan publik (*public service*) seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, penegak hukum dan sebagainya. Meskipun tujuan utama sektor publik adalah pelayanan publik bukan berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, peningkatan laba pada perusahaan-perusahaan milik negara atau milik daerah (BUMN/BUMD) dan juga upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah contoh adanya tujuan finansial pada organisasi sektor publik.

b. Sumber Pembiayaan

Sumber pendanaan atau sumber pembiayaan pada sektor publik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, *charging for services*, laba perusahaan milik negara pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri, obligasi daerah dan lain-lain. Pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

c. Sistem Akuntansi

Organisasi sektor publik menggunakan sistem *cash toward to accrual* artinya ada beberapa akun yang diperlakukan dengan basis kas ada juga sebagian akun yang diperlakukan dengan basis akrual. Namun, pada tahun 2015 yang akan datang semua organisasi sektor publik harus sudah menggunakan basis akrual.

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Menurut Baldric dan Siregar (2011), terdapat dua jenis batasan hukum dan administrasi yang ditekankan pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan organisasi pemerintah, yaitu:

a. Penggunaan Dana

Dana dalam akuntansi pemerintahan bukan merupakan jumlah aktiva yang disisihkan untuk tujuan tertentu, melainkan merupakan suatu kesatuan akuntansi dan fiskal yang memiliki seperangkat akun yang berimbang

sendiri untuk mencatat kas dan sumber keuangan lain, bersama-sama dengan utang dan saldo ekuitas serta perubahan-perubahan yang terjadi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan dan batasan-batasan lain.

b. Peranan Anggaran

Anggaran pada akuntansi pemerintah ditujukan untuk perencanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan. Satu hal yang membedakan anggaran dalam organisasi pemerintah dengan organisasi komersial adalah terletak pada perencanaannya.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Halim (2009) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

a. Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*)

Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut tujuan pertanggungjawaban ini mewajibkan setiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

b. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah

Definisi Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara,

peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Sementara itu, peraturan menteri dalam negeri No. 59 tahun 2007 pasal 232 juncto, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai: “serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.” Bastian (2007) memandang sistem akuntansi pemerintah daerah dari proses atau prosedur baik itu dengan menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi. Prosedur yang dimaksud dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah.

Sistem dan Prosedur Pencatatan

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi adalah pembukuan, padahal menurut akuntansi pengertian demikian tidaklah tepat. Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Menurut Halim (2009), terdapat beberapa sistem pencatatan yaitu *single entry*, *double entry* and *triple entry*. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry* sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut.

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali saja. Sistem pencatatan *single entry* atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan, antara lain kurang bagus untuk pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi.

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

Dengan menggunakan *double entry accounting* maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media *cross-check*. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, *double entry* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal akurat, karena jumlah sisi debet harus sama dengan jumlah sisi kredit.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

Prosedur Pencatatan

Prosedur pencatatan pada akuntansi pemerintahan menurut Afiah (2009) dibagi ke dalam enam bagian, yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

a. Prosedur Pencatatan Akuntansi Pendapatan

Transaksi pendapatan di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh kas daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Akuntansi Pendapatan ini juga dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

b. Prosedur Pencatatan Akuntansi Belanja

Transaksi belanja di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat saat pengesahan SPJ bila menggunakan SP2D UP/GU/TU atau pada saat menerima SP2D LS bila menggunakan LS. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Untuk transaksi belanja modal pencatatan dilakukan secara *corollary*, yaitu dicatat dengan dua jurnal.

c. Prosedur Pencatatan Akuntansi Pembiayaan

Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto dan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. Sedangkan

transaksi pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

d. **Prosedur Pencatatan Akuntansi Aset**

Prosedur pencatatan aset pada akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) lebih merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemda. Berdasarkan bukti yang ada, fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang memuat informasi tentang jenis/nama aset, kode rekening terkait, nilai aset dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi akuntansi PPKD.

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan adalah diduga bahwa penerapan prosedur akuntansi keuangan daerah pada Kantor Pemerintah Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian direncanakan selama tiga bulan, yaitu bulan Mei sampai Juli 2018.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan/ Pernyataan yang tidak berbentuk angka yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Gowa, seperti data tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka, seperti data produksi data, data persediaan dan laporan keuangan perusahaan.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden,
- b. Data Sekunder berupa laporan tahunan Pemerintah Kabupaten Gowa, serta data lainnya yang bersumber dari literatur-literatur yang mendukung permasalahan yang dibahas. Data sekunder digunakan untuk memberikan dukungan secara deskriptif kualitatif mengenai permasalahan yang dibahas.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah:

1. Observasi, yaitu peninjauan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui keadaan atau kondisi sesungguhnya di lapangan, guna memperoleh informasi
2. Wawancara, teknik ini merupakan pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui cara berkomunikasi secara langsung (tatap muka) dengan subyek penelitian (sumbernya).
4. Teknik dokumentasi, teknik ini digunakan untuk memperoleh sejumlah data melalui dokumen tertulis tentang hal-hal yang relevan dengan kebutuhan penulis dalam penulisan ini. Seperti data tentang struktur organisasi, data kepegawaian (personalia) dan sebagainya.

Metode Analisis

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Prosedur akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah serangkaian langkah-langkah mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisan, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer
2. Laporan keuangan daerah adalah suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi (pemerintah daerah) yang disusun secara sistematis oleh akuntan

pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Aspek Geografis

Kabupaten Gowa berada pada 1.193.773° Bujur Barat dan 1.200.317° Bujur Timur, 082.9342.862° Lintang Utara dan 5.577.305.437° Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto, sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar. Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.

Kependudukan

Dilihat dari jumlah penduduknya, Kabupaten Gowa termasuk Kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil Sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 652.941 jiwa. Pada Tahun 2009 jumlah penduduk mencapai 617.317 jiwa, sehingga penduduk pada Tahun 2010 bertambah sebesar 5,45 persen. Persebaran penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk perkecamatan yang masih sangat timpang. Untuk wilayah Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng dan

Bajeng Barat, yang wilayahnya hanya 11,42 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa, dihuni oleh sekitar 54,35 persen penduduk Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu, yang meliputi sekitar 88,58 persen wilayah Gowa hanya dihuni oleh sekitar 45,65 persen penduduk Gowa.

Ketenagakerjaan

Dari seluruh angkatan kerja, tercatat 236.013 jiwa atau sekitar 90,44 persen dari total angkatan kerja termasuk bekerja dan sisanya mencari pekerjaan. Bila dibedakan menurut jenis kelamin, angkatan kerja laki-laki berjumlah 171.642 jiwa sedangkan angkatan kerja perempuan sebanyak 89.291 jiwa. Penduduk usia kerja laki-laki yang mencapai 48,22 persen, sementara angkatan kerja laki-laki ternyata lebih dominan mencapai 65,78 persen dari total angkatan kerja dan angkatan kerja perempuan sebesar 34,22 persen. Dilihat dari lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kabupaten Gowa bekerja di sektor pertanian, yaitu sekitar 42,82 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Angka ini bila dibanding tahun lalu sedikit lebih besar dan sektor ini masih menjadi mata pencaharian utama penduduk Gowa.

Kinerja Makroekonomi Dasar Kabupaten Gowa

Penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas) jumlah penduduk Kabupaten gowa pada tahun 2012 adalah 670.465 jiwa yang terdiri dari 329.673 jiwa atau 49,17 persen penduduk laki-laki dan 340.792 jiwa atau 50,83 persen penduduk perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan penduduk yang bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha (penganggur) terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia dan konsep ketenagakerjaan dari *International Labour Organization* (ILO), yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa, maka jumlah angkatan kerja di Kabupaten Gowa pada tahun 2012 adalah sebanyak 41,69 persen dari total penduduk sebesar 670.465 atau sebanyak 279.549 orang.

Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil utama dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah Laporan Pertanggungjawaban APBD yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di sidang paripurna DPRD

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gowa

Laporan Keuangan Daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Laporan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan yang dibuat oleh keuangan daerah terdiri dari:

- a. Laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
- b. Nota perhitungan APBD
- c. Neraca
- d. Laporan Arus Kas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang menjadi tuntutan di era reformasi dan merupakan pengejawantahan misi pertama dalam Renstra Kabupaten Gowa dalam rangka mewujudkan visi Pemerintahan kabupaten. Konsepsi pemerintahan yang baik mengandung arti terciptanya hubungan sinergis antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dalam rangka implementasi instruksi presiden no. 7 tahun 1999, maka pemerintah kabupaten Gowa sebagai bagian dari integral dari negara kesatuan RI berkewajiban untuk menyusun LAKIP Kabupaten Gowa yang implementasinya mengacu kepada PP no. 105 tahun 2000 dan PP no. 108 tahun 2000 menyangkut dua aspek yaitu:

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan tolak ukur Renstra.
- b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

LAKIP Pemkab Gowa disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu instansi di Pemkab Gowa dalam memahami tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan ataupun kegagalan instansi tersebut dalam mengelola sumber-sumber daya yang tersedia untuk menjalankan program dan kegiatan pemerintahan. LAKIP Pemkab Gowa adalah sebagai media informasi dan evaluasi terhadap kegiatan ataupun program yang telah dilaksanakan guna perbaikan dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang tersedia.

Analisis dan Evaluasi

Penyusunan struktur organisasi dalam suatu organisasi sangat penting dilakukan guna mempermudah pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola-pola tata hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berada dalam suatu struktur organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi dalam pembuatan keputusan dalam satuan kerja. Hubungan dan kerja sama dalam organisasi dapat diketahui secara jelas dengan melihat struktur organisasi. Struktur organisasi pengelola keuangan daerah pemerintah kabupaten Gowa berbentuk garis, di mana atasan mempunyai sejumlah bawahan dan memiliki tanggung jawab secara langsung mengenai tugas-tugas bawahannya kepada atasannya. Hal ini memudahkan koordinasi dan pengarahan antara atasan kepada bawahannya.

Analisis dan Evaluasi Terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Sistem Akuntansi keuangan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Gowa adalah sistem akuntansi keuangan daerah yang ditentukan oleh PP 105 tahun 2000. Sistem akuntansi ini berbeda dengan sistem akuntansi yang digunakan sebelum tahun 2000, sehingga terjadi perbedaan format struktur laporan keuangan. Dengan adanya perkembangan teknologi, sistem akuntansi dikembangkan dengan komputerisasi. Pemerintah kabupaten telah mewujudkannya dengan melengkapi kantornya dengan seperangkat komputer (*hardware and software*) yang mereka perlukan.

Akan tetapi, walaupun pemerintah kabupaten Gowa telah menggunakan sistem komputerisasi dalam penyusunan laporan keuangan, namun laporan keuangan masih mengalami keterlambatan. Hal ini juga disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang tidak dapat menggunakan sistem aplikasi secara optimal dan juga jumlah komputer yang belum memadai. Oleh sebab itu, untuk lebih mengoptimalkan penerapan aplikasi sistem akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan, hendaknya pemerintah kabupaten Gowa memberikan pelatihan aplikasi manual sistem dan akuntansi keuangan daerah. Begitu juga dengan latar belakang pendidikan pegawai yang bekerja di bagian keuangan harus memiliki basis pengetahuan ekonomi akuntansi.

Pelaksanaan otonomi daerah secara maksimal, selayaknya pemerintah kabupaten Gowa menerapkan anggaran berdasarkan kinerja. Penerapan anggaran kinerja merupakan tuntutan yang mau tidak mau harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai eksekutif merupakan pihak-pihak yang paling bertanggungjawab dalam peningkatan kinerja dan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*. Penerapan anggaran kinerja merupakan syarat mutlak untuk menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Penerapan anggaran berbasis kinerja bersifat *transferable* atau dapat ditransfer, bahkan peraturan perundang-undangan yang ada mengharuskan penerapan anggaran kinerja di tiap pemerintah daerah. Kendala utama adalah belum terintegrasinya pengembangan sistem manajemen keuangan pemerintah yang mencakup sub sistem perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, sistem informasi dan audit. Pedoman-pedoman yang dikeluarkan masih bersifat parsial dan sering tidak bersesuaian sehingga harus dilakukan penyesuaian atau konversi dari suatu subsistem ke subsistem lainnya.

Kendala lainnya yaitu sumber daya manusia (SDM) mengingat perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia tidak secepat perkembangan akuntansi komersial, sampai saat ini masih sedikit sekali SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Begitu juga dengan kurangnya kepedulian di lingkungan pemerintah daerah untuk mendasarkan keputusan dalam informasi keuangan.

Prosedur yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten terdiri dari prosedur penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas dan pelaporan keuangannya. Prosedur penerimaan kas terdiri dari penerimaan pajak daerah, pajak retribusi daerah disetor langsung ke kas daerah, semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan bunga atau nama lain sebagai akibat penjualan atau pengadaan barang dan penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah, serta pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat waktu ke kas daerah telah sesuai dengan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gowa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah kabupaten Gowa telah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah dengan peralatan yang

kurang memadai yaitu sistem komputerisasi yang belum dikuasai dan jumlah komputer yang masih kurang sehingga penyusunan laporan keuangan mengalami keterlambatan.

2. Penyebab terjadinya keterlambatan penyusunan laporan keuangan salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang memadai dan mahir dalam aplikasi sistem akuntansi keuangan daerah di pemerintah kabupaten Gowa belum memadai, sehingga penyusunan laporan keuangan yang telah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah mengalami keterlambatan.
3. Pelaporan pertanggungjawaban pada akhir tahun yaitu Laporan Perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan arus kas dan neraca telah sesuai. Akan tetapi, format laporan pertanggungjawaban pada laporan perhitungan APBD kurang sesuai karena tidak adanya perbandingan dengan tahun sebelumnya, hanya sebatas satu periode saja sementara dalam PP no. 108 tahun 2000 harus ada perbandingan satu periode berjalan dengan periode sebelumnya. Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa telah menggunakan prosedur akuntansi secara berganda walaupun secara manual, begitu juga dengan Laporan Arus Kas yang telah mencantumkan saldo awal tahun sebelumnya sesuai dengan PP no. 105 dan 108 tahun 2000. Neraca pada pemerintahan kabupaten Gowa telah menggunakan *T. Account* sesuai dalam PP no. 105 dan 108 tahun 2000.
4. Struktur organisasi pengelola keuangan pemerintah kabupaten Gowa berbentuk garis, di mana atasan mempunyai sejumlah bawahan dan tanggung jawab langsung mengenai tugas-tugas atasannya. Hal ini dapat memudahkan koordinasi antara atasan dan bawahan serta memudahkan pengawasan oleh atasan kepada bawahan.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya sumber daya manusia yang memahami akuntansi sehingga implementasi sistem ini dapat lebih mudah. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui perekrutan pegawai dengan kualifikasi di bidang akuntansi yang memadai serta melakukan pelatihan-pelatihan yang cukup kepada SDM yang telah ada.

2. Menggunakan sistem komputerisasi yang dapat mempermudah pekerjaan pembukuan dan memanfaatkannya bagi pengendalian manajemen keuangan daerah juga menambah peralatan yang menyediakan aplikasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Afiah, Nunuy Nur. 2009. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Alam, S. 2009. Akuntansi SMA untuk Kelas XI. Jakarta: Esis.
- Bastian, Indra. 2011. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Fajar, Adrianus. 2010. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. (Tidak untuk dipublikasikan)
- Freeman, Robert J. 2008. Governmental Nonprofit Accounting Theory and Practice. New Jersey: Prentice-hall, Inc.
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- IAI Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan, Edisi Ketujuh. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
- Roviyantie, Devi. 2011. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Siregar, Baldrick. 2011. Akuntansi Pemerintah Dengan Sistem Dana. Yogyakarta: STIE YKPN.